



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1083, 2022

KEMENKUMHAM. Jabatan. Kelas Jabatan.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan, perubahan dan penghapusan jabatan dan kelas jabatan, serta penataan birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menyesuaikan jabatan dan kelas jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi

- Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 102);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pusat yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 900);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 102) diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan.
- (1a) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang terdampak penataan birokrasi diberikan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal akumulasi komponen penghasilan yang diterima mengalami penurunan, maka penghasilannya dibayarkan sebesar penghasilannya pada Jabatan Administrasinya; dan

- b. dalam hal akumulasi komponen penghasilan yang diterima lebih besar atau sama dengan besaran penghasilan pada saat menjadi pejabat administrasi, maka penghasilannya dibayarkan sesuai penghasilan yang diterima pada Jabatan Fungsionalnya.
 - (2) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
KETENTUAN PERALIHAN

3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 7C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Pegawai yang telah menduduki Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, penetapan Kelas Jabatan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Menteri ini, sampai dengan selesai melaksanakan tugas dalam jabatannya sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. Pegawai yang akan menduduki Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, penetapan Kelas Jabatan berpedoman pada Kelas Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7B

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diberhentikan karena alasan:

- a. diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil;
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan

- d. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana yang tugas jabatannya selain pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya, pada saat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, penetapan Kelas Jabatan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 7C

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penetapan jenjang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B disesuaikan dengan jenjang terakhir Perancang Peraturan Perundang-undangan dan ketersediaan lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

4. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
 HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR
 9 TAHUN 2021 TENTANG JABATAN DAN
 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
 MANUSIA

DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN
 UNTUK JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRASI,
 JABATAN FUNGSIONAL, DAN JABATAN LAINNYA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

A. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI,
 PEJABAT ADMINISTRATOR, DAN PEJABAT PENGAWAS

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	SEKRETARIS JENDERAL	17
2	KEPALA BIRO PERENCANAAN	15
3	KEPALA BAGIAN REFORMASI BIROKRASI	12
4	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN	12
5	KEPALA BAGIAN TATA LAKSANA DAN TATA USAHA	12
6	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
7	KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN	15
8	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN, SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAN TATA USAHA	12
9	KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI	12
10	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
11	KEPALA BIRO KEUANGAN	15
12	KEPALA BAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN TATA USAHA	12
13	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
14	KEPALA BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	12
15	KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	15
16	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA DAN TATA USAHA	12
17	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
18	KEPALA BAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA	12
19	KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG MILIK NEGARA	12
20	KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM, DAN KERJA SAMA	15
21	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
22	KEPALA BAGIAN LAYANAN ADVOKASI HUKUM DAN	12

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	TATA USAHA	
23	KEPALA BIRO UMUM	15
24	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
25	KEPALA BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN	12
26	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA MENTERI DAN WAKIL MENTERI	9
27	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIS JENDERAL	9
28	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA STAF AHLI DAN STAF KHUSUS MENTERI	9
29	KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA DAN TATA USAHA	12
30	KEPALA SUBBAGIAN URUSAN DALAM	9
31	KEPALA SUBBAGIAN KENDARAAN DAN PERJALANAN DINAS	9
32	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN PENGAMANAN	12
33	KEPALA SUBBAGIAN ACARA DAN TAMU PIMPINAN	9
34	KEPALA SUBBAGIAN KEPROTOKOLAN	9
35	KEPALA SUBBAGIAN PENGAMANAN PIMPINAN	9
36	KEPALA SUBBAGIAN PENGAMANAN LINGKUNGAN, INSTALASI, DOKUMEN, DAN JALUR INFORMASI	9
37	KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	15
38	KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	12
39	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
40	INSPEKTUR JENDERAL	17
41	SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL	15
42	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12
43	KEPALA BAGIAN UMUM	12
44	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9
45	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9
46	INSPEKTUR WILAYAH I	15
47	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
48	INSPEKTUR WILAYAH II	15
49	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
50	INSPEKTUR WILAYAH III	15
51	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
52	INSPEKTUR WILAYAH IV	15
53	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
54	INSPEKTUR WILAYAH V	15
55	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
56	INSPEKTUR WILAYAH VI	15
57	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
58	DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI	17
59	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	15

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
60	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12
61	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12
62	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12
63	KEPALA BAGIAN UMUM	12
64	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9
65	DIREKTUR LALU LINTAS KEIMIGRASIAN	15
66	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
67	DIREKTUR IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	15
68	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
69	DIREKTUR INTELIJEN KEIMIGRASIAN	15
70	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
71	DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	15
72	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
73	DIREKTUR KERJA SAMA KEIMIGRASIAN	15
74	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
75	DIREKTUR SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	15
76	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
77	DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN	17
78	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	15
79	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12
80	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12
81	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12
82	KEPALA BAGIAN UMUM	12
83	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9
84	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9
85	DIREKTUR KEAMANAN DAN KETERTIBAN	15
86	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
87	DIREKTUR PERAWATAN KESEHATAN DAN REHABILITASI	15
88	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
89	DIREKTUR PELAYANAN TAHANAN DAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA	15
90	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
91	DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KERJA SAMA	15
92	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
93	DIREKTUR BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PENGENTASAN ANAK	15
94	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
95	DIREKTUR PEMBINAAN NARAPIDANA DAN LATIHAN	15

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	KERJA PRODUKSI	
96	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
97	DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	17
98	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	15
99	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12
100	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12
101	KEPALA BAGIAN UMUM	12
102	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9
103	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9
104	DIREKTUR PERDATA	15
105	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
106	DIREKTUR PIDANA	15
107	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
108	DIREKTUR TATA NEGARA	15
109	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
110	DIREKTUR OTORITAS PUSAT DAN HUKUM INTERNASIONAL	15
111	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
112	DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI	15
113	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
114	DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	17
115	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	15
116	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12
117	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12
118	KEPALA BAGIAN UMUM	12
119	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9
120	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9
121	DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI	15
122	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
123	DIREKTUR PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG	15
124	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
125	DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	15
126	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
127	DIREKTUR KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	15
128	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
129	DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL	15
130	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
131	DIREKTUR PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN	15

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	SENGKETA	
132	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
133	DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA	17
134	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA	15
135	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12
136	KEPALA BAGIAN UMUM	12
137	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9
138	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9
139	DIREKTUR PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT	15
140	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
141	DIREKTUR KERJA SAMA HAK ASASI MANUSIA	15
142	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
143	DIREKTUR DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA	15
144	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
145	DIREKTUR INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA	15
146	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
147	DIREKTUR FASILITASI DAN INFORMASI HAK ASASI MANUSIA	15
148	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
149	DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	17
150	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15
151	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12
152	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12
153	KEPALA BAGIAN UMUM	12
154	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9
155	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9
156	DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15
157	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
158	DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I	15
159	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
160	DIREKTUR PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN, DAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15
161	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
162	DIREKTUR LITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15
163	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
164	DIREKTUR FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN	15

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	PERUNDANG-UNDANGAN	
165	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
166	DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN II	15
167	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
168	KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	17
169	SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	15
170	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12
171	KEPALA BAGIAN UMUM	12
172	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9
173	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9
174	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN TEKNIS DAN KEPEMIMPINAN	15
175	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
176	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN FUNGSIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA	15
177	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
178	KEPALA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI	15
179	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
180	DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN	15
181	WAKIL DIREKTUR I	14
182	WAKIL DIREKTUR II	14
183	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KETARUNAAN	12
184	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM POLITEKNIK PEMASYARAKATAN	12
185	KEPALA SUBBAGIAN AKADEMIK	9
186	KEPALA SUBBAGIAN KETARUNAAN	9
187	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	9
188	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	9
189	DIREKTUR POLITEKNIK IMIGRASI	15
190	WAKIL DIREKTUR I	14
191	WAKIL DIREKTUR II	14
192	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN PESERTA DIDIK POLITEKNIK IMIGRASI	12
193	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM POLITEKNIK IMIGRASI	12
194	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK POLITEKNIK IMIGRASI	9
195	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI PESERTA DIDIK POLITEKNIK IMIGRASI	9
196	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN POLITEKNIK IMIGRASI	9

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
197	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA POLITEKNIK IMIGRASI	9
198	KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	17
199	SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	15
200	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12
201	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12
202	KEPALA BAGIAN UMUM	12
203	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9
204	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9
205	KEPALA PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL	15
206	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
207	KEPALA PUSAT PERENCANAAN HUKUM NASIONAL	15
208	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
209	KEPALA PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL	15
210	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
211	KEPALA PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM	15
212	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
213	KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	17
214	SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA	15
215	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12
216	KEPALA BAGIAN UMUM	12
217	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9
218	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9
219	KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM	15
220	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
221	KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA	15
222	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
223	KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN	15
224	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
225	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PENELITIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	15
226	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
227	KEPALA KANTOR WILAYAH	15
228	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI	14
229	KEPALA BAGIAN UMUM	12
230	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, TATA USAHA,	9

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	DAN RUMAH TANGGA	
231	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA	9
232	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	12
233	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	9
234	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, REFORMASI BIROKRASI, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	9
235	KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN	14
236	KEPALA BIDANG PEMBINAAN, BIMBINGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	12
237	KEPALA SUBBIDANG BIMBINGAN DAN PENGENTASAN ANAK	9
238	KEPALA SUBBIDANG PEMBINAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KERJA SAMA	9
239	KEPALA BIDANG PELAYANAN TAHANAN, KESEHATAN, REHABILITASI, PENGELOLAAN BENDA SITAAN, BARANG RAMPASAN NEGARA, KEAMANAN	12
240	KEPALA SUBBIDANG PENGELOLAAN BENDA SITAAN, BARANG RAMPASAN NEGARA, DAN KEAMANAN	9
241	KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN TAHANAN, PERAWATAN KESEHATAN, DAN REHABILITASI	9
242	KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN	14
243	KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN INFORMASI KEIMIGRASIAN	12
244	KEPALA SUBBIDANG PERIZINAN KEIMIGRASIAN	9
245	KEPALA SUBBIDANG INFORMASI KEIMIGRASIAN	9
246	KEPALA BIDANG INTELJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	12
247	KEPALA SUBBIDANG INTELJEN KEIMIGRASIAN	9
248	KEPALA SUBBIDANG PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9
249	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	14
250	KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM	12
251	KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	9
252	KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	9
253	KEPALA BIDANG HUKUM	12
254	KEPALA SUBBIDANG FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	9
255	KEPALA SUBBIDANG PENYULUHAN HUKUM, BANTUAN HUKUM, DAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM	9
256	KEPALA BIDANG HAK ASASI MANUSIA	12
257	KEPALA SUBBIDANG PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA	9
258	KEPALA SUBBIDANG PENGKAJIAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	9

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
259	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I	14
260	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	11
261	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	11
262	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN	9
263	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9
264	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9
265	KEPALA BIDANG PEMBINAAN NARAPIDANA	11
266	KEPALA SEKSI REGISTRASI	9
267	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	9
268	KEPALA SEKSI PERAWATAN NARAPIDANA	9
269	KEPALA BIDANG KEGIATAN KERJA	11
270	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KERJA	9
271	KEPALA SEKSI SARANA KERJA	9
272	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN HASIL KERJA	9
273	KEPALA BIDANG ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	11
274	KEPALA SEKSI KEAMANAN	9
275	KEPALA SEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	9
276	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA	12
277	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9
278	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
279	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8
280	KEPALA URUSAN UMUM	8
281	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK	9
282	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8
283	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PERAWATAN	8
284	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA	9
285	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA DAN PENGELOLAAN HASIL KERJA	8
286	KEPALA SUBSEKSI SARANA KERJA	8
287	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9
288	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8
289	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8
290	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA NARKOTIKA	12
291	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9
292	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
293	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8
294	KEPALA URUSAN UMUM	8
295	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK	9

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
296	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8
297	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PERAWATAN	8
298	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA	9
299	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA DAN PENGELOLAAN HASIL KERJA	8
300	KEPALA SUBSEKSI SARANA KERJA	8
301	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9
302	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8
303	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8
304	KEPALA LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA KELAS I	12
305	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9
306	KEPALA SEKSI REGISTRASI, PERAWATAN DAN PELAYANAN	9
307	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN	9
308	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN KLASIFIKASI	8
309	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN	8
310	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN	8
311	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN	8
312	KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I	12
313	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9
314	KEPALA SEKSI REGISTRASI DAN KLASIFIKASI	9
315	KEPALA SEKSI PEMBINAAN	9
316	KEPALA SEKSI PERAWATAN	9
317	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN	9
318	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN TATA USAHA	8
319	KEPALA URUSAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	8
320	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8
321	KEPALA SUBSEKSI PENILAIAN DAN PENGKLASIFIKASIAN	8
322	KEPALA SUBSEKSI PENDIDIKAN DAN LATIHAN KETERAMPILAN	8
323	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PENGENTASAN	8
324	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN MAKANAN, MINUMAN DAN PERLENGKAPAN NARAPIDANA	8
325	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN KESEHATAN	8
326	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN	8
327	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA	12

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
328	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
329	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK	9
330	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA	9
331	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9
332	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9
333	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8
334	KEPALA URUSAN UMUM	8
335	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8
336	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PERAWATAN	8
337	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA DAN PENGELOLAAN HASIL KERJA	8
338	KEPALA SUBSEKSI SARANA KERJA	8
339	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8
340	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8
341	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB	12
342	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9
343	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
344	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8
345	KEPALA URUSAN UMUM	8
346	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA	9
347	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9
348	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8
349	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK	8
350	KEPALA SUBSEKSI KEGIATAN KERJA	8
351	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8
352	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8
353	KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II	12
354	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9
355	KEPALA SEKSI REGISTRASI DAN KLASIFIKASI	9
356	KEPALA SEKSI PEMBINAAN	9
357	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN	9
358	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN TATA USAHA	8
359	KEPALA URUSAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	8
360	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8
361	KEPALA SUBSEKSI PENILAIAN DAN	8

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	PENGLASIFIKASIAN	
362	KEPALA SUBSEKSI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8
363	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN	8
364	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN	8
365	KEPALA LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA KELAS II	10
366	KEPALA URUSAN UMUM	8
367	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN KLASIFIKASI	8
368	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN DAN PELAYANAN	8
369	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN	8
370	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB	12
371	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9
372	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
373	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8
374	KEPALA URUSAN UMUM	8
375	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA	9
376	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8
377	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK	8
378	KEPALA SUBSEKSI KEGIATAN KERJA	8
379	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9
380	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8
381	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8
382	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TERBUKA	12
383	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9
384	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
385	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8
386	KEPALA URUSAN UMUM	8
387	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA /ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA	9
388	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8
389	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK	8
390	KEPALA SUBSEKSI KEGIATAN KERJA	8
391	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9
392	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
393	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8
394	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS III	10
395	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8
396	KEPALA SUBSEKSI ADMISI DAN ORIENTASI	8
397	KEPALA SUBSEKSI PEMBINAAN	8
398	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	8
399	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I	12
400	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUMAH TAHANAN NEGARA	9
401	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8
402	KEPALA SEKSI PELAYANAN TAHANAN	9
403	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PERAWATAN	8
404	KEPALA SUBSEKSI BANTUAN HUKUM DAN PENYULUHAN	8
405	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEGIATAN	8
406	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN RUMAH TAHANAN NEGARA	9
407	KEPALA SUBSEKSI KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	8
408	KEPALA SUBSEKSI UMUM	8
409	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA	10
410	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUMAH TAHANAN NEGARA	8
411	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN	8
412	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEGIATAN	8
413	KEPALA SUBSEKSI PENGELOLAAN RUMAH TAHANAN NEGARA	8
414	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA	10
415	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN	8
416	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEGIATAN	8
417	KEPALA SUBSEKSI PENGELOLAAN RUMAH TAHANAN NEGARA	8
418	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUMAH TAHANAN NEGARA	8
419	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB	10
420	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUMAH TAHANAN NEGARA	8
421	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN	8
422	KEPALA SUBSEKSI PENGELOLAAN RUMAH TAHANAN NEGARA	8
423	KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I	12
424	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
425	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8
426	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8
427	KEPALA URUSAN UMUM	8

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
428	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA	9
429	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8
430	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8
431	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA	8
432	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN ANAK	9
433	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8
434	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8
435	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA	8
436	KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II	10
437	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8
438	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA	8
439	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN ANAK	8
440	KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KLAS I	10
441	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PEMELIHARAAN	8
442	KEPALA SUBSEKSI PENGAMANAN DAN PENGELOLAAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA	8
443	KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II	10
444	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA	8
445	KEPALA BALAI HARTA PENINGGALAN	12
446	KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH I	9
447	KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH II	9
448	KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH III	9
449	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
450	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI	14
451	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	11
452	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	9
453	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9
454	KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	11
455	KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	9
456	KEPALA SEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9
457	KEPALA BIDANG DOKUMEN PERJALANAN DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	11
458	KEPALA SEKSI DOKUMEN PERJALANAN KEIMIGRASIAN	9
459	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	9
460	KEPALA BIDANG INTELJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	11
461	KEPALA SEKSI INTELJEN KEIMIGRASIAN	9
462	KEPALA SEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
463	KEPALA BIDANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	11
464	KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN I	10
465	KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN II	10
466	KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN III	10
467	KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN IV	10
468	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI	14
469	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	11
470	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	9
471	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9
472	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN	11
473	KEPALA SEKSI PELAYANAN DOKUMEN PERJALANAN	9
474	KEPALA SEKSI VERIFIKASI DAN ADJUDIKASI DOKUMEN PERJALANAN	9
475	KEPALA BIDANG IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN	11
476	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	9
477	KEPALA SEKSI STATUS KEIMIGRASIAN	9
478	KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	11
479	KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	9
480	KEPALA SEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9
481	KEPALA BIDANG INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	11
482	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	9
483	KEPALA SEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9
484	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI	12
485	KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9
486	KEPALA SUBSEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	8
487	KEPALA SUBSEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	8
488	KEPALA SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN	9
489	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN DOKUMEN PERJALANAN	8
490	KEPALA SUBSEKSI PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN	8
491	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN	9
492	KEPALA SUBSEKSI IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	8
493	KEPALA SUBSEKSI STATUS KEIMIGRASIAN	8
494	KEPALA SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9
495	KEPALA SUBSEKSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	8
496	KEPALA SUBSEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
497	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
498	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8
499	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8
500	KEPALA URUSAN UMUM	8
501	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI	12
502	KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9
503	KEPALA SUBSEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	8
504	KEPALA SUBSEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	8
505	KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN	9
506	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN DOKUMEN PERJALANAN	8
507	KEPALA SUBSEKSI VERIFIKASI DAN ADJUDIKASI DOKUMEN PERJALANAN	8
508	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN	9
509	KEPALA SUBSEKSI IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	8
510	KEPALA SUBSEKSI STATUS KEIMIGRASIAN	8
511	KEPALA SEKSI INTELJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9
512	KEPALA SUBSEKSI INTELJEN KEIMIGRASIAN	8
513	KEPALA SUBSEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8
514	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
515	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8
516	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8
517	KEPALA URUSAN UMUM	8
518	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI	11
519	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
520	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8
521	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8
522	KEPALA URUSAN UMUM	8
523	KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9
524	KEPALA SUBSEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	8
525	KEPALA SUBSEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	8
526	KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	9
527	KEPALA SUBSEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN	8
528	KEPALA SUBSEKSI IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	8
529	KEPALA SEKSI INTELJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
530	KEPALA SUBSEKSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	8
531	KEPALA SUBSEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8
532	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI	11
533	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
534	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8
535	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8
536	KEPALA URUSAN UMUM	8
537	KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9
538	KEPALA SUBSEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	8
539	KEPALA SUBSEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	8
540	KEPALA SEKSI DOKUMEN DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	9
541	KEPALA SUBSEKSI DOKUMEN PERJALANAN	8
542	KEPALA SUBSEKSI IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	8
543	KEPALA SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9
544	KEPALA SUBSEKSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	8
545	KEPALA SUBSEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8
546	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS III TPI	10
547	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8
548	KEPALA SUBSEKSI LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	8
549	KEPALA SUBSEKSI TEKNOLOGI INFORMASI, INTELIJEN, DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8
550	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI	10
551	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8
552	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN KEIMIGRASIAN	8
553	KEPALA SUBSEKSI TEKNOLOGI INFORMASI, INTELIJEN, DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8
554	KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT	14
555	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	11
556	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9
557	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN	9
558	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9
559	KEPALA BIDANG REGISTRASI DAN PERAWATAN	11
560	KEPALA SEKSI REGISTRASI, ADMINISTRASI DAN PELAPORAN	9
561	KEPALA SEKSI PERAWATAN	9
562	KEPALA SEKSI KESEHATAN	9
563	KEPALA BIDANG PENEMPATAN, KEAMANAN, PEMULANGAN DAN DEPORTASI	11
564	KEPALA SEKSI KEAMANAN	10

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
565	KEPALA SEKSI PENEMPATAN	9
566	KEPALA SEKSI PEMULANGAN DAN DEPORTASI	9
567	KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI	12
568	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
569	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8
570	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8
571	KEPALA URUSAN UMUM	8
572	KEPALA SEKSI REGISTRASI, ADMINISTRASI DAN PELAPORAN	9
573	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8
574	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PELAPORAN	8
575	KEPALA SEKSI PERAWATAN DAN KESEHATAN	9
576	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN	8
577	KEPALA SUBSEKSI KESEHATAN	8
578	KEPALA SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	10
579	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	9
580	KEPALA SUBSEKSI KETERTIBAN	9
581	KEPALA RUMAH SAKIT	12
582	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9
583	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	9
584	KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	13
585	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9
586	KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN	9
587	KEPALA SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI	9

B. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI	
	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	8
	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	10
	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	12
	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI UTAMA	14
2	PEMERIKSA PATEN AHLI	
	PEMERIKSA PATEN AHLI PERTAMA	8
	PEMERIKSA PATEN AHLI MUDA	9
	PEMERIKSA PATEN AHLI MADYA	11
	PEMERIKSA PATEN AHLI UTAMA	13

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
3	PEMERIKSA MEREK AHLI	
	PEMERIKSA MEREK AHLI PERTAMA	8
	PEMERIKSA MEREK AHLI MUDA	9
	PEMERIKSA MEREK AHLI MADYA	11
	PEMERIKSA MEREK AHLI UTAMA	13
4	PEMERIKSA MEREK TERAMPIL	
	PEMERIKSA MEREK PELAKSANA	6
	PEMERIKSA MEREK PELAKSANA LANJUTAN	7
	PEMERIKSA MEREK PENYELIA	8
5	DOKTER/SPELIALIS	
	DOKTER PERTAMA	8
	DOKTER MUDA	9
	DOKTER MADYA	11
	DOKTER UTAMA	13
6	DOKTER GIGI/SPELIALIS	
	DOKTER GIGI PERTAMA	8
	DOKTER GIGI MUDA	9
	DOKTER GIGI MADYA	11
	DOKTER GIGI UTAMA	13
7	PERAWAT GIGI	
	PERAWAT GIGI PELAKSANA	6
	PERAWAT GIGI PELAKSANA LANJUTAN	7
	PERAWAT GIGI PENYELIA	8
8	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	
	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	6
	TERAPIS GIGI DAN MULUT MAHIR	7
	TERAPIS GIGI DAN MULUT PENYELIA	8
9	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI	
	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	8
	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI MUDA	9
	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI MADYA	11
10	PERAWAT AHLI	
	PERAWAT AHLI PERTAMA	8
	PERAWAT AHLI MUDA	9
	PERAWAT AHLI MADYA	11
	PERAWAT AHLI UTAMA	13
11	PERAWAT TERAMPIL	6
	PERAWAT MAHIR	7

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	PERAWAT PENYELIA	8
12	ARSIPARIS AHLI	
	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	8
	ARSIPARIS AHLI MUDA	9
	ARSIPARIS AHLI MADYA	11
	ARSIPARIS AHLI UTAMA	13
13	ARSIPARIS TERAMPIL	
	ARSIPARIS PELAKSANA	6
	ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN	7
	ARSIPARIS PENYELIA	8
14	PUSTAKAWAN AHLI	
	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	8
	PUSTAKAWAN AHLI MUDA	9
	PUSTAKAWAN AHLI MADYA	11
	PUSTAKAWAN AHLI UTAMA	13
15	PUSTAKAWAN TERAMPIL	
	PUSTAKAWAN PELAKSANA	6
	PUSTAKAWAN PELAKSANA LANJUTAN	7
	PUSTAKAWAN PENYELIA	8
16	WIDYAIWARA AHLI	
	WIDYAIWARA AHLI PERTAMA	8
	WIDYAIWARA AHLI MUDA	10
	WIDYAIWARA AHLI MADYA	12
	WIDYAIWARA AHLI UTAMA	14
17	PENELITI AHLI	
	PENELITI AHLI PERTAMA	8
	PENELITI AHLI MUDA	9
	PENELITI AHLI MADYA	11
	PENELITI AHLI UTAMA	13
18	AUDITOR AHLI	
	AUDITOR AHLI PERTAMA	8
	AUDITOR AHLI MUDA	10
	AUDITOR AHLI MADYA	12
	AUDITOR AHLI UTAMA	14
19	AUDITOR TERAMPIL	
	AUDITOR PELAKSANA	6
	AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN	7
	AUDITOR PENYELIA	9

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
20	PRANATA KOMPUTER AHLI	
	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8
	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	9
	PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA	11
	PRANATA KOMPUTER AHLI UTAMA	13
21	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	
	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	6
	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	7
	PRANATA KOMPUTER PENYELIA	8
22	ANALIS KEPEGAWAIAN TERAMPIL	
	ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA	6
	ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA LANJUTAN	7
	ANALIS KEPEGAWAIAN PENYELIA	8
23	PRANATA SDM APARATUR TERAMPIL	
	PRANATA SDM APARATUR TERAMPIL	6
	PRANATA SDM APARATUR MAHIR	7
	PRANATA SDM APARATUR PENYELIA	8
24	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI	
	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA	8
	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MUDA	9
	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MADYA	11
	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI UTAMA	13
25	ANALIS SDM APARATUR AHLI	
	ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA	8
	ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA	10
	ANALIS SDM APARATUR AHLI MADYA	12
	ANALIS SDM APARATUR AHLI UTAMA	14
26	PSIKOLOG KLINIS AHLI	
	PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA	8
	PSIKOLOG KLINIS AHLI MUDA	9
	PSIKOLOG KLINIS AHLI MADYA	11
27	PENERJEMAH AHLI	
	PENERJEMAH AHLI PERTAMA	8
	PENERJEMAH AHLI MUDA	9
	PENERJEMAH AHLI MADYA	11
	PENERJEMAH AHLI UTAMA	13
28	APOTEKER AHLI	

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	APOTEKER AHLI PERTAMA	8
	APOTEKER AHLI MUDA	9
	APOTEKER AHLI MADYA	11
	APOTEKER AHLI UTAMA	13
29	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	
	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA PEMULA	5
	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA	6
	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA LANJUTAN	7
	ASISTEN APOTEKER PENYELIA	8
30	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI	
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	8
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MUDA	9
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MADYA	11
31	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA PEMULA	5
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA	6
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN LANJUTAN	7
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA	8
32	FISIOTERAPIS AHLI	
	FISIOTERAPIS AHLI PERTAMA	8
	FISIOTERAPIS AHLI MUDA	9
	FISIOTERAPIS AHLI MADYA	11
33	FISIOTERAPIS TERAMPIL	
	FISIOTERAPIS PELAKSANA	6
	FISIOTERAPIS PELAKSANA LANJUTAN	7
	FISIOTERAPIS PENYELIA	8
34	RADIOGRAFER TERAMPIL	
	RADIOGRAFER PELAKSANA	6
	RADIOGRAFER PELAKSANA LANJUTAN	7
	RADIOGRAFER PENYELIA	8
35	PEREKAM MEDIS	
	PEREKAM MEDIS PELAKSANA	6
	PEREKAM MEDIS PELAKSANA LANJUTAN	7
	PEREKAM MEDIS PENYELIA	8
36	NUTRISIONIS AHLI	
	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	8

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	NUTRISIONIS AHLI MUDA	9
	NUTRISIONIS AHLI MADYA	11
37	NUTRISIONIS TERAMPIL	
	NUTRISIONIS PELAKSANA	6
	NUTRISIONIS PELAKSANA LANJUTAN	7
	NUTRISIONIS PENYELIA	8
38	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI	
	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	8
	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA	9
	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA	11
39	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI AHLI	
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI PERTAMA	8
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI MUDA	9
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI MADYA	11
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI UTAMA	13
40	BIDAN AHLI	
	BIDAN AHLI PERTAMA	8
	BIDAN AHLI MUDA	9
	BIDAN AHLI MADYA	11
	BIDAN AHLI UTAMA	13
41	BIDAN TERAMPIL	
	BIDAN PELAKSANA/TERAMPIL	6
	BIDAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7
	BIDAN PENYELIA	8
42	PENYULUH HUKUM AHLI	
	PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA	8
	PENYULUH HUKUM AHLI MUDA	9
	PENYULUH HUKUM AHLI MADYA	11
	PENYULUH HUKUM AHLI UTAMA	13
43	ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI	
	ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI PERTAMA	8
	ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI MUDA	9
	ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI MADYA	11
	ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI UTAMA	13
44	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN TERAMPIL	
	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PEMULA	5
	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PELAKSANA	6

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7
	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PENYELIA	8
45	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN AHLI	
	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN AHLI PERTAMA	8
	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN AHLI MUDA	9
	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN AHLI MADYA	11
	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN AHLI UTAMA	13
46	ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN	
	ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PELAKSANA/TERAMPIL	6
	ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7
	ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PENYELIA	8
47	DOSEN	
	ASISTEN AHLI	9
	LEKTOR	11
	LEKTOR KEPALA	13
	PROFESOR	15
48	PERENCANA AHLI	
	PERENCANA AHLI PERTAMA	8
	PERENCANA AHLI MUDA	10
	PERENCANA AHLI MADYA	12
49	ANALIS KEBIJAKAN AHLI	
	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	8
	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	9
	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA	11
	ANALIS KEBIJAKAN AHLI UTAMA	13
50	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI	
	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	8
	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA	10
	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MADYA	12
51	AUDITOR KEPEGAWAIAN AHLI	
	AUDITOR KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA	8
	AUDITOR KEPEGAWAIAN AHLI MUDA	9
	AUDITOR KEPEGAWAIAN AHLI MADYA	11
52	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI	

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	8
	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA	10
	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA	12
	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI UTAMA	14
53	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PELAKSANA	6
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PELAKSANA LANJUTAN	7
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PENYELIA	8
54	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI	
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	8
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA	9
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MADYA	11
55	ANALIS ANGGARAN AHLI	
	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	8
	ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA	10
	ANALIS ANGGARAN AHLI MADYA	12
56	ANALIS INTELIJEN AHLI	
	ANALIS INTELIJEN AHLI PERTAMA	8
	ANALIS INTELIJEN AHLI MUDA	9
57	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT TERAMPIL	
	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PELAKSANA	6
	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT LANJUTAN	7
	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PENYELIA	8
58	ANALIS HUKUM AHLI	
	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	8
	ANALIS HUKUM AHLI MUDA	9
	ANALIS HUKUM AHLI MADYA	11
	ANALIS HUKUM AHLI UTAMA	13
59	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI	
	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA	8
	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MUDA	9
	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MADYA	11

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI UTAMA	13
60	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI	
	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	8
	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MUDA	10
	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MADYA	12
61	KURATOR KEPERDATAAN AHLI	
	KURATOR KEPERDATAAN AHLI PERTAMA	8
	KURATOR KEPERDATAAN AHLI MUDA	9
	KURATOR KEPERDATAAN AHLI MADYA	11
	KURATOR KEPERDATAAN AHLI UTAMA	13
62	PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN AHLI	
	PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN AHLI PERTAMA	8
	PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN AHLI MUDA	9
	PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN AHLI MADYA	11
	PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN AHLI UTAMA	13
63	PENGAMAN PEMASYARAKATAN PEMULA	5
	PENGAMAN PEMASYARAKATAN TERAMPIL	6
	PENGAMAN PEMASYARAKATAN MAHIR	7
	PENGAMAN PEMASYARAKATAN PENYELIA	8
64	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU TERAMPIL	
	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU TERAMPIL	6
	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU MAHIR	7
	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU PENYELIA	8
65	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI	
	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	8
	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI MUDA	9
	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI MADYA	11
	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI UTAMA	13
66	PENATA PENERBITAN ILMIAH AHLI	

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	PENATA PENERBITAN ILMIAH AHLI PERTAMA	8
	PENATA PENERBITAN ILMIAH AHLI MUDA	9
	PENATA PENERBITAN ILMIAH AHLI MADYA	11
67	ANALIS DATA ILMIAH AHLI	
	ANALIS DATA ILMIAH AHLI PERTAMA	8
	ANALIS DATA ILMIAH AHLI MUDA	9
	ANALIS DATA ILMIAH AHLI MADYA	11
	ANALIS DATA ILMIAH AHLI UTAMA	13
68	PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TERAMPIL	
	PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TERAMPIL	7
	PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MAHIR	8
	PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PENYELIA	9
69	PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN TERAMPIL	
	PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN TERAMPIL	6
	PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN MAHIR	7
	PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN PENYELIA	8
70	PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN AHLI	
	PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN AHLI PERTAMA	8
	PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN AHLI MUDA	9
	PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN AHLI MADYA	11
71	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI	
	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI PERTAMA	8
	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI MUDA	9
	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI MADYA	11
72	ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI	
	ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL PERTAMA	8
	ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL MUDA	9
	ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL MADYA	11
	ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL UTAMA	13
73	PENATA MEDIASI SENGKETA HAK ASASI MANUSIA AHLI	
	PENATA MEDIASI SENGKETA HAK ASASI MANUSIA PERTAMA	8
	PENATA MEDIASI SENGKETA HAK ASASI MANUSIA MUDA	9
	PENATA MEDIASI SENGKETA HAK ASASI MANUSIA	11

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	MADYA	

C. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN LAINNYA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
STAF AHLI DAN STAF KHUSUS MENTERI		
1	STAF AHLI BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	16
2	STAF AHLI BIDANG EKONOMI	16
3	STAF AHLI BIDANG SOSIAL	16
4	STAF AHLI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	16
5	STAF AHLI BIDANG PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI	16
6	STAF KHUSUS MENTERI	16
PELAKSANA		
1	BENDAHARA PENGELUARAN PUSAT	8
2	BENDAHARA PENERIMAAN PUSAT	8
3	ANALIS DATA INTELIJEN	7
4	ANALIS EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7
5	ANALIS JABATAN	7
6	ANALIS HUKUM	7
7	ANALIS KEBUTUHAN DAN MANFAAT PELATIHAN	7
8	ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL	7
9	ANALIS KELEMBAGAAN	7
10	ANALIS KONSEPSI, PRAKARSA DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7
11	ANALIS KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN	7
12	ANALIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN	7
13	ANALIS PELINDUNGAN HAK-HAK SIPIL DAN HAK ASASI MANUSIA	7
14	ANALIS PENDAPAT HUKUM DAN ADVOKASI	7
15	ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT	7
16	ANALIS PENGEMBANGAN HUKUM	7
17	ANALIS PENGEMBANGAN PEGAWAI	7
18	ANALIS PENYELESAIAN PEWARGANEGARAAN	7
19	ANALIS PERATURAN DAERAH	7
20	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7
21	ANALIS PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA	7
22	ANALIS PERJANJIAN KERJA SAMA	7
23	ANALIS PERMASALAHAN HAM	7
24	ANALIS PERMASALAHAN HUKUM	7

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
25	ANALIS PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI	7
26	ANALIS PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	7
27	ANALIS PERMOHONAN PENDAPAT HUKUM	7
28	ANALIS PERTIMBANGAN BANTUAN HUKUM	7
29	ANALIS PERTIMBANGAN EKSTRADISI	7
30	ANALIS PERTIMBANGAN HUKUM	7
31	ANALIS PROGRAM BIMBINGAN	7
32	ANALIS RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7
33	ANALIS SIDIK JARI	7
34	ANALIS SISTEM APLIKASI DAN JARINGAN KOMPUTER	7
35	ANALIS SISTEM PROSEDUR DAN METODE KERJA	7
36	ANALIS STANDARDISASI SARANA KERJA	7
37	BENDAHARA PENERIMAAN SATUAN KERJA	7
38	BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA	7
39	KUSTODIAN BARANG MILIK NEGARA	7
40	NAHKODA	7
41	PENATA KEUANGAN	7
42	PENELAHAH DOKUMEN FISIK PERSEROAN	7
43	PENELAHAH KEIMIGRASIAN	7
44	PENELAHAH RANCANGAN PERJANJIAN EKSTRADISI	7
45	PENELAHAH STATUS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN	7
46	PENERJEMAH BAHAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7
47	PENGEVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN	7
48	PENYULUH HAK ASASI MANUSIA	7
49	PENYUSUN ABSTRAKSI HUKUM	7
50	PENYUSUN BAHAN KERJA SAMA	7
51	PENYUSUN INFORMASI HUKUM	7
52	PENYUSUN KONSEP KETERANGAN PEMERINTAH	7
53	PENYUSUN LAPORAN DAN HASIL EVALUASI	7
54	PENYUSUN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	7
55	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	7
56	PENYUSUN LAPORAN PENGAWASAN	7
57	PENYUSUN MATERI BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH	7
58	PENYUSUN MATERI KEBIJAKAN	7
59	PENYUSUN MATERI PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7
60	PENYUSUN NASKAH AKADEMIK	7
61	PENYUSUN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	7
62	PENYUSUN PROGRAM	7
63	PENYUSUN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	7

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
64	PENYUSUN TINDAK LANJUT DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	7
65	ANALIS ASET NEGARA	7
66	ANALIS BARANG MILIK NEGARA	7
67	ANALIS BERKAS SENGKETA	7
68	ANALIS DATA AKADEMIK	7
69	ANALIS DATA DAN INFORMASI	7
70	ANALIS DATA STANDARISASI	7
71	ANALIS DIKLAT	7
72	ANALIS FORENSIK DIGITAL	7
73	ANALIS GIZI	7
74	ANALIS HASIL PENGAWASAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT	7
75	ANALIS HUBUNGAN ANTARLEMBAGA	7
76	ANALIS HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	7
77	ANALIS INFORMASI	7
78	ANALIS INFORMASI PENDIDIKAN	7
79	ANALIS INTELJEN	7
80	ANALIS KEAMANAN	7
81	ANALIS PENILAIAN	7
82	ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL	7
83	ANALIS KERJA SAMA	7
84	ANALIS KERJASAMA LUAR NEGERI	7
85	ANALIS KESEHATAN	7
86	ANALIS KINERJA	7
87	ANALIS KOMERSIALISASI HKI	7
88	ANALIS KOMPETENSI	7
89	ANALIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	7
90	ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	7
91	ANALIS MUTASI PEJABAT NEGARA	7
92	ANALIS MUTU AKADEMIK	7
93	ANALIS PARTAI POLITIK	7
94	ANALIS PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN	7
95	ANALIS PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN TENAGA TEKNIK DAN FUNGSIONAL NON PENDIDIK	7
96	ANALIS PELAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN	7
97	ANALIS PELAYANAN	7
98	ANALIS PEMASYARAKATAN	7
99	ANALIS PENATAAN JARINGAN	7
100	ANALIS PENEGAKAN INTEGRITAS DAN DISIPLIN SDM APARATUR	7
101	ANALIS PENERAPAN APLIKASI DAN KONTEN	7
102	ANALIS PENGAMANAN LINGKUNGAN	7
103	ANALIS PENGEMBANGAN KARIR	7
104	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI	7
105	ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR	7

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
106	ANALIS PENINDAKAN	7
107	ANALIS PENYAKIT MENULAR	7
108	ANALIS PENYIDIKAN	7
109	ANALIS PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI	7
110	ANALIS PERATURAN ADMINISTRASI	7
111	ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7
112	ANALIS PERBENDAHARAAN	7
113	ANALIS PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	7
114	ANALIS PERENCANAAN	7
115	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN	7
116	ANALIS PERENCANAAN DAN KERJASAMA	7
117	ANALIS PERENCANAAN SDM APARATUR	7
118	ANALIS PERENCANAAN STRATEGIS	7
119	ANALIS PRODUK HUKUM	7
120	ANALIS PROGRAM DIKLAT	7
121	ANALIS PUBLIKASI	7
122	ANALIS REKENING PEMERINTAH	7
123	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7
124	ANALIS RESOSIALISASI DAN REHABILITASI	7
125	ANALIS SATUAN PENGAWAS INTERNAL	7
126	ANALIS SISTEM AKUNTANSI PUSAT	7
127	ANALIS SISTEM INFORMASI	7
128	ANALIS SISTEM INFOMASI DAN DISEMINASI HUKUM	7
129	ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN	7
130	ANALIS STANDAR MUTU BAHAN DAN PERALATAN	7
131	ANALIS STANDAR TEKNOLOGI INFORMASI	7
132	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	7
133	ANALIS TATA USAHA	7
134	BENDAHARA	7
135	FASILITATOR PROMOSI	7
136	INVESTIGATOR	7
137	PEMERIKSA ANGGARAN	7
138	PEMBINA JASMANI DAN MENTAL	7
139	PEMERIKSA TEKNOLOGI INFORMASI	7
140	PENATA KENDARAAN DINAS	7
141	PENATA LAPORAN KEUANGAN	7
142	PENELAAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	7
143	PENGAWAS TEKNOLOGI INFORMASI	7
144	PENGENDALI TEKNOLOGI INFORMASI	7
145	PENGEVALUASI PROGRAM DAN KINERJA	7
146	PENYULUH KEARSIPAN	7
147	PENYULUH KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT	7
148	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	7

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
149	PENYUSUN BAHAN BANTUAN HUKUM	7
150	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	7
151	PENYUSUN BAHAN MATERI BIMBINGAN	7
152	PENYUSUN BAHAN PENYULUHAN HUKUM	7
153	PENYUSUN BAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SISTEM DAN METODA	7
154	PENYUSUN BERITA DAN PENDAPAT UMUM	7
155	PENYUSUN KURIKULUM, MODUL, DAN BAHAN AJAR	7
156	PENYUSUN LAPORAN HASIL DIKLAT	7
157	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	7
158	PENYUSUN PROGRAM KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA	7
159	PENYUSUN PROGRAM PENYELENGGARAAN DIKLAT	7
160	PENYUSUN RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	7
161	PENYUSUN RENCANA HASIL TELAAHAN USUL PENGHAPUSAN BARANG	7
162	PENYUSUN RENCANA HUKUM	7
163	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	7
164	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA	7
165	PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN	7
166	PENYUSUN RENCANA KEHUMASAN DAN PERPUSTAKAAN	7
167	PENYUSUN RENCANA KEUANGAN	7
168	PENYUSUN RENCANA KEUANGAN DAN BMN	7
169	PENYUSUN RENCANA MUTASI	7
170	PENYUSUN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN	7
171	PENYUSUN RENCANA PENGADAAN DAN SARANA PRASARANA	7
172	PENYUSUN STANDAR TEKNOLOGI INFORMASI	7
173	PENYUSUN TEKNIS PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI APARATUR DAN NON APARATUR	7
174	PERANCANG GRAFIS	7
175	PERANCANG KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	7
176	PERANCANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	7
177	PERANCANG SISTEM PEMASYARAKATAN ATAU REGISTRATOR	7
178	DOKUMENTALIS HUKUM	6
179	KOMANDAN JAGA PEMASYARAKATAN/KEIMIGRASIAN	6
180	PENGELOLA ARSIP KEPEGAWAIAN	6
181	PENGELOLA BANTUAN HUKUM	6
182	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
183	PENGELOLA BENDA SITAAN NEGARA/BARANG RAMPASAN NEGARA	6
184	PENGELOLA DATA	6
185	PENGELOLA DATA KEIMIGRASIAN	6
186	PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	6
187	PENGELOLA DATA PENGHARMONISASIAN	6
188	PENGELOLA HASIL KERJA	6
189	PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI	6
190	PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	6
191	PENGELOLA KEUANGAN	6
192	PENGELOLA PEMBIMBINGAN KEMANDIRIAN	6
193	PENGELOLA PEMBINAAN BANTUAN	6
194	PENGELOLA PEMBINAAN INTELEKTUAL	6
195	PENGELOLA PEMBINAAN KEMANDIRIAN	6
196	PENGELOLA PEMBINAAN KEPRIBADIAN	6
197	PENGELOLA PEMBINAAN ROHANI	6
198	PENGELOLA PENERBITAN JURNAL LEGISLASI INDONESIA	6
199	PENGELOLA PENSIUN/PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	6
200	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	6
201	PENGELOLA PROGRAM GIZI	6
202	PENGELOLA RUMAH DETENSI	6
203	PENGELOLA SARANA KERJA	6
204	PENGELOLA SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN	6
205	PENGELOLA TATA NASKAH	6
206	PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI	6
207	PENGELOLA WEBSITE	6
208	PENGEVALUASI KEGIATAN PROGRAM	6
209	PENGOLAH APLIKASI SISTEM INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6
210	PENGOLAH BAHAN DISTRIBUSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6
211	PENGOLAH BAHAN EVALUASI DAN DOKUMENTASI EKSTRADISI	6
212	PENGOLAH BAHAN EVALUASI DAN PELAPORAN	6
213	PENGOLAH BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	6
214	PENGOLAH BAHAN PENGKAJIAN DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6
215	PENGOLAH BAHAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN	6
216	PENGOLAH DAN PENYUSUN BAHAN BIMBINGAN TEKNIS HAK ASASI MANUSIA	6
217	PENGOLAH DAN PENYUSUN DATA FASILITATOR BIMBINGAN TEKNIS HAK ASASI MANUSIA	6
218	PENGOLAH DAN PENYUSUN DATA PELAYANAN	6

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	KOMUNIKASI MASYARAKAT	
219	PENGOLAH DAN PENYUSUN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN BIMBINGAN TEKNIS	6
220	PENGOLAH DATA ADMINISTRASI KOMISI BANDING	6
221	PENGOLAH DATA ANGGARAN	6
222	PENGOLAH DATA APLIKASI DAN DATABASE	6
223	PENGOLAH DATA DAKTILOSKOPI	6
224	PENGOLAH DATA DAN BAHAN PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	6
225	PENGOLAH DATA DAN DOKUMENTASI HUKUM INTERNASIONAL UMUM	6
226	PENGOLAH DATA DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA	6
227	PENGOLAH DATA EVALUASI DAN INFORMASI	6
228	PENGOLAH DATA HARTA PENINGGALAN	6
229	PENGOLAH DATA HASIL LAPORAN VERIFIKASI	6
230	PENGOLAH DATA HASIL PENELITIAN	6
231	PENGOLAH DATA HASIL PERTIMBANGAN DAN PENILAIAN PERLENGKAPAN	6
232	PENGOLAH DATA INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG	6
233	PENGOLAH DATA INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI	6
234	PENGOLAH DATA KEGIATAN ANTARBADAN INTERNASIONAL	6
235	PENGOLAH DATA KEGIATAN RENCANA, PROGRAM DAN ANGGARAN	6
236	PENGOLAH DATA KELEMBAGAAN	6
237	PENGOLAH DATA KERJASAMA	6
238	PENGOLAH DATA KESEHATAN	6
239	PENGOLAH DATA KLASIFIKASI DESAIN INDUSTRI	6
240	PENGOLAH DATA KLASIFIKASI KELAS BARANG	6
241	PENGOLAH DATA KOMPILASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MASALAH DAN KASUS	6
242	PENGOLAH DATA KOVENAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	6
243	PENGOLAH DATA KOVENAN HAK SIPIL DAN POLITIK	6
244	PENGOLAH DATA LAPORAN	6
245	PENGOLAH DATA LAPORAN ANALISA KEBUTUHAN DAN PEMBAKUAN PERLENGKAPAN	6
246	PENGOLAH DATA LAPORAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	6
247	PENGOLAH DATA LAPORAN HAK KELOMPOK RENTAN	6
248	PENGOLAH DATA LAPORAN HAK SIPIL DAN POLITIK	6
249	PENGOLAH DATA LAPORAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT	6
250	PENGOLAH DATA LAPORAN HASIL PENYALURAN PERLENGKAPAN	6

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
251	PENGOLAH DATA LAPORAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN	6
252	PENGOLAH DATA LAPORAN MATERI INFORMASI	6
253	PENGOLAH DATA LAPORAN METODOLOGI DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA	6
254	PENGOLAH DATA LAPORAN PENILAIAN PERBENDAHARAAN	6
255	PENGOLAH DATA LAPORAN PRODUKSI DAN INFORMASI	6
256	PENGOLAH DATA LAPORAN SISTEM APLIKASI DAN DATABASE	6
257	PENGOLAH DATA PENGEMBANGAN JARINGAN BIMBINGAN TEKNIS HAK ASASI MANUSIA	6
258	PENGOLAH DATA PERENCANAAN DAN PROGRAM	6
259	PENGOLAH DATA WASIAT	6
260	PENGOLAH SAI	6
261	PENYUSUN BAHAN KOORDINASI DAN MONITORING PERSIDANGAN	6
262	PENYUSUN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA	6
263	PRANATA LAPORAN KEUANGAN	6
264	PRANATA PASUKAN PENGAMANAN DALAM	6
265	PRANATA SIDIK JARI	6
266	REGISTRATOR PEMASYARAKATAN	6
267	ROHANIawan AGAMA/PEMBIMBING AGAMA	6
268	SEKRETARIS PIMPINAN	6
269	TEKNISI JARINGAN	6
270	TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	6
271	VERIFIKATOR	6
272	PENATA LIPUTAN	6
273	VERIFIKATOR ANGGARAN	6
274	VERIFIKATOR BERKAS PERMOHONAN HAK	6
275	VERIFIKATOR DATA LAPORAN KEUANGAN	6
276	VERIFIKATOR KEUANGAN	6
277	AJUDAN	6
278	JURNALIS	6
279	PENGELOLA AKUNTANSI	6
280	PENGELOLA ANGGARAN	6
281	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6
282	PENGELOLA BAHAN PUSTAKA	6
283	PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	6
284	PENGELOLA DATA LAPORAN DAN PENGADUAN	6
285	PENGELOLA DATA PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	6
286	PENGELOLA DATA PENCEGAHAN DAN MONTORING	6
287	PENGELOLA DATA PENYELENGGARAAN TES	6

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
288	PENGELOLA DATA PNBP	6
289	PENGELOLA DATA REKONSILIASI	6
290	PENGELOLA DATA TATA ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	6
291	PENGELOLA DATABASE	6
292	PENGELOLA DATABASE SURAT PERINTAH MEMBAYAR	6
293	PENGELOLA DISIPLIN PEGAWAI	6
294	PENGELOLA DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM	6
295	PENGELOLA DOKUMENTASI	6
296	PENGELOLA FASILITASI BANTUAN HUKUM	6
297	PENGELOLA GAJI	6
298	PENGELOLA GUDANG	6
299	PENGELOLA INFORMASI KERJA SAMA	6
300	PENGELOLA INFORMASI PRODUK HUKUM	6
301	PENGELOLA KEAMANAN SISTEM INFORMASI	6
302	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6
303	PENGELOLA LAYANAN KEHUMASAN	6
304	PENGELOLA MEDIA CETAK	6
305	PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI	6
306	PENGELOLA PELAYANAN HUKUM	6
307	PENGELOLA PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN	6
308	PENGELOLA PENATAAN SARANA DAN PRASARANA	6
309	PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK	6
310	PENGELOLA PENGEMBANGAN KARIR	6
311	PENGELOLA PENGKAJIAN DAN PENELAAHAN HUKUM	6
312	PENGELOLA PENYELENGGARAAN DIKLAT	6
313	PENGELOLA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6
314	PENGELOLA PERJALANAN DINAS	6
315	PENGELOLA PERKARA	6
316	PENGELOLA PERPUSTAKAAN	6
317	PENGELOLA POLIKLINIK	6
318	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	6
319	PENGELOLA PUSTAKA ELEKTRONIK	6
320	PENGELOLA SARANA PRASARANA RUMAH TANGGA DINAS	6
321	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR	6
322	PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	6
323	PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN	6
324	PENGELOLA SITUS ATAU WEB	6
325	PENGELOLA STANDAR TEKNOLOGI INFORMASI	6
326	PENGELOLA TERJEMAHAN DAN KERJA SAMA	6

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
327	PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN	6
328	PENGELOLA WISMA	6
329	PENGOLAH DAFTAR GAJI	6
330	PENGOLAH DATA ANGGARAN BELANJA NEGARA	6
331	PENGOLAH DATA APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATA SISTEM KEUANGAN	6
332	PENGOLAH DATA INFORMASI DAN HUKUM	6
333	PENGOLAH DATA INTELIJEN	6
334	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN KLASIFIKASI BARANG	6
335	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN	6
336	PENGOLAH DATA LAPORAN REALISASI ANGGARAN	6
337	PENGOLAH DATA MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN	6
338	PENGOLAH DATA PENGANGGARAN	6
339	PENGOLAH DATA PENGELOLAAN KEUANGAN	6
340	PENGOLAH DATA PENYIDIKAN DAN BARANG HASIL PENINDAKAN	6
341	PENGOLAH DATA PERBENDAHARAAN	6
342	PENGOLAH DATA PNBK KEMENTERIAN LEMBAGA	6
343	PENGOLAH DATA SISTEM AKUNTANSI	6
344	PENGOLAH DATA SISTEM INFORMASI DAN DISEMINASI HUKUM	6
345	PENGOLAH INFORMASI MEDIA	6
346	PENGOLAH KONTEN MEDIA SOSIAL	6
347	SEKRETARIS	6
348	PRANATA ACARA	6
349	PRANATA JASMANI DAN MENTAL	6
350	PRANATA KEARSIPAN	6
351	PRANATA SIDIK JARI	6
352	OPERATOR KOMPUTER	5
353	PEMBUAT DAFTAR GAJI	5
354	PEMELIHARA KANTOR	5
355	PEMERIKSA PELANGGARAN TATA TERTIB	5
356	PEMROSES BERKAS PERMOHONAN HARTA PENINGGALAN	5
357	PEMROSES DATA PENYIDIKAN DAN LITIGASI	5
358	PEMROSES IZIN ADVOKAT ASING	5
359	PEMROSES JAMINAN SOSIAL	5
360	PEMROSES LAYANAN HUKUM UMUM	5
361	PEMROSES LEGALISASI	5
362	PEMROSES MUTASI KEPEGAWAIAN	5
363	PEMROSES PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN	5
364	PEMROSES PENETAPAN PENGHAPUSAN	5

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	PERLENGKAPAN	
365	PEMROSES PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI	5
366	PEMROSES PENGEMBANGAN METODE PENYULUHAN HUKUM	5
367	PEMROSES PENYELESAIAN SENGKETA, LITIGASI DAN PENYIDIKAN	5
368	PEMROSES PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	5
369	PEMROSES STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA	5
370	PEMROSES URUSAN ADMINISTRASI KOMISI BANDING	5
371	PENATAUSAHAAN	5
372	PENGADMINISTRASI BARANG DAN ATK	5
373	PENGADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA	5
374	PENGADMINISTRASI DATA PERMOHONAN PENDAPAT HUKUM	5
375	PENGADMINISTRASI JAMINAN FIDUSIA	5
376	PENGADMINISTRASI KEBUTUHAN DAN PEMBAKUAN PERLENGKAPAN	5
377	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5
378	PENGADMINISTRASI LAYANAN KUNJUNGAN	5
379	PENGADMINISTRASI MANAJEMEN OUTSOURCING TEKNOLOGI INFORMASI	5
380	PENGADMINISTRASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5
381	PENGADMINISTRASI PERJALANAN DINAS	5
382	PENGADMINISTRASI PERLENGKAPAN KEAMANAN	5
383	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	5
384	PENGADMINISTRASI UMUM	5
385	PENGAMBIL SIDIK JARI	5
386	PENGAWAL TAHANAN/NARAPIDANA	5
387	PENGELOLA ADMINISTRASI DIKLAT	5
388	PENGELOLA DAN PENGOLAH MAKANAN	5
389	PENGELOLA HASIL BELAJAR/EVALUASI PESERTA DIKLAT/PELATIHAN	5
390	PENGELOLA HUKUMAN DISIPLIN	5
391	PENGELOLA KENDARAAN DINAS	5
392	PENGHIMPUN BERITA	5
393	PENGHUBUNG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5
394	PENGHUBUNG ANTARLEMBAGA	5
395	PENGOLAH ADMINISTRASI PIMPINAN	5
396	PENGOLAH ARSIP DAN DOKUMENTASI	5
397	PENGOLAH ARSIP TERAAN	5
398	PENGOLAH DATA GAJI PEGAWAI	5
399	PENGOLAH DATA INVENTARIS	5

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
400	PENGOLAH DATA KEGIATAN PENGAMANAN	5
401	PENGOLAH DATA KENDARAAN OPERASIONAL	5
402	PENGOLAH DATA LAPORAN PEMBUKUAN	5
403	PENGOLAH DATA LAPORAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN	5
404	PENGOLAH DATA LAPORAN PENGIRIMAN DAN PENGANGKUTAN PERLENGKAPAN	5
405	PENGOLAH DATA SIDIK JARI	5
406	PENJAGA PINTU UTAMA PEMASYARAKATAN	5
407	PENJAGA TAHANAN	5
408	PENYIAP BAHAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5
409	PENYIAP BAHAN BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERANCANG PERATURAN DAERAH	5
410	PENYIAP BAHAN DISTRIBUSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5
411	PENYIAP BAHAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5
412	PENYIAP BAHAN HUKUM TIDAK TERTULIS	5
413	PENYIAP BAHAN KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM	5
414	PENYIAP BAHAN LAPORAN DAN EVALUASI	5
415	PENYIAP BAHAN LAPORAN HASIL PERTEMUAN ILMIAH	5
416	PENYIAP BAHAN LEGALISASI	5
417	PENYIAP BAHAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	5
418	PENYIAP BAHAN PEMBELAJARAN	5
419	PENYIAP BAHAN PENELITIAN HUKUM	5
420	PENYIAP BAHAN PENETAPAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL	5
421	PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN JARINGAN INFORMASI HUKUM	5
422	PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN METODE PENYULUHAN HUKUM	5
423	PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN OTOMASI	5
424	PENYIAP BAHAN PENGKAJIAN HUKUM	5
425	PENYIAP BAHAN PENYELENGGARA DIKLAT/PELATIHAN/PENYULUHAN	5
426	PENYIAP BAHAN PUBLIKASI	5
427	PENYIAP BAHAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5
428	PENYIAP DATA DAN BAHAN PENGHARMONISASIAN	5
429	PENYIAP DATA DAN PROGRAM LEGISLASI	5
430	PENYIAP DATA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	5
431	PENYIAP DOKUMENTASI NASKAH PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5
432	PENYUSUN ARSIP DAN DOKUMENTASI	5
433	PETUGAS DOKUMENTASI (FOTOGRAFER)	5

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
434	PETUGAS PENGAMANAN DETENI	5
435	PETUGAS PROTOKOL	5
436	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	5
437	POLISI KHUSUS KEIMIGRASIAN/PEMASYARAKATAN	5
438	SATUAN PENGAMAN TAHANAN/NARAPIDANA	5
439	TEKNISI	5
440	PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	5
441	PETUGAS KEAMANAN	5
442	PRANATA TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUTER	5
443	TEKNISI JARINGAN INSTALASI	5
444	TEKNISI LISTRIK, TELEPON, AC, DAN LIFT	5
445	PENGADMINISTRASI ANGGARAN	5
446	PENGADMINISTRASI DATA PENYAJIAN DAN PUBLIKASI	5
447	PENGADMINISTRASI DATA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5
448	PENGADMINISTRASI HUKUM	5
449	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5
450	PENGADMINISTRASI LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING	5
451	PENGADMINISTRASI PARTAI	5
452	PENGADMINISTRASI PELATIHAN	5
453	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5
454	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	5
455	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	5
456	PENGADMINISTRASI REKAM MEDIS DAN INFORMASI	5
457	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	5
458	PENGADMINISTRASI PROGRAM DAN KERJASAMA	5
459	OPERATOR MESIN	4
460	OPERATOR TELEPON	4
461	PENGELOLA KELENGKAPAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA/TAHANAN	4
462	PRAMU ACARA	4
463	TARUNA AKADEMI	4
464	AGENDARIS	3
465	CARAKA	3
466	PENGEMUDI	3
467	PETUGAS PENGGANDAAN	3
468	PRAMU BAKTI	3

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY